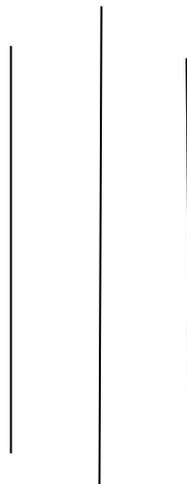




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
KE PROVINSI RIAU PADA RESES
MASA PERSIDANGAN V 2022-2023
TANGGAL 14 – 18 JULI 2023**



**KOMISI V DPR RI
JAKARTA, 2023**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
I.1. Dasar Hukum	3
I.2. Maksud dan Tujuan	3
I.3. Lokasi dan Waktu	4
I.4. Agenda Kunjungan	4
II. HASIL KUNJUNGAN	5
II.1. Gambaran Umum	5
II.2. Temuan dan Permasalahan	6
II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi	12
III. PENUTUP	13
LAMPIRAN	14
Dokumentasi	



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
DI PROVINSI RIAU
RESES MASA PERSIDANGAN V 2022 - 2023
TANGGAL 14 – 18 JULI 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI Tanggal 16 Mei 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Tanggal 14 – 18 Juli 2023 adalah untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Riau khususnya yang dibiayai dari anggaran pembangunan dan belanja negara (APBN).

Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

- a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*

butir d. *Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f. *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dilaksanakan dalam rangka reses masa persidangan V 2022 - 2023 di Provinsi Riau pada Tanggal 14 – 18 Juli 2023.

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi adalah

1. Peninjauan ruas Jalan Lintas Bono di Kabupaten Pelalawan;
2. Peninjauan Terminal Type A Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
3. Peninjauan Kegiatan Pembangunan Instalasi Perpipaan Air Limbah (IPAL) Kota Pekanbaru;
4. Peninjauan Revitalisasi Embung Danau Bokuok, Kabupaten Kampar
5. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Riau dan Kepala Daerah (atau yang mewakili) seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Riau, yang dihadiri oleh seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI.

II. HASIL KUNJUNGAN

II.1. Gambaran Umum

Wilayah Provinsi Riau memiliki luas 87.023,66 km², dan itu berarti setara dengan 18,4 persen dari wilayah Pulau Sumatra. Kabupaten Pelalawan adalah kabupaten dengan luas wilayah terbesar yaitu 12.758,45 km². Sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah Kota Pekanbaru dengan luas 632,27 km².¹

Data terkait Kondisi Jalan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

II.1.1. Jalan Nasional

Sesuai Kepmen PUPR No. 248/KPTS/2015 (fungsi jalan) dan Kepmen PUPR No. 290/KPTS/M/2015 (status jalan) Jalan Nasional di Provinsi Riau mempunyai panjang 1.325 Km yang terdiri dari:

- Jalan Arteri Primer (Lintas Timur), mulai dari batas Sumatera Utara –Dumai – Duri – Pekanbaru - Rengat - Batas Jambi;
- Jalan Kolektor Primer 1 (Lintas Penghubung), menghubungkan
 - Sp, Ujung Tanjung - Bagan Siapi-Api,
 - Pekanbaru-Bangkinang-Batas Sumatera Barat,
 - Pekanbaru-Taluk Kuantan-Batas Sumatera Barat,
 - Sp. Lago-Sp. Buatan-Mengkapan/Buton,
 - Jalan Lintas Timur/Pematang Reba-Rengat,
 - Jalan Lintas Timur-Kuala Enok;

Permasalahan :

- Tingkat kemantapan jalan nasional di Provinsi Riau tahun 2022 = **91,45%**;
- Kualitas Jalan Nasional penghubung menuju simpul transportasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih rendah (menuju Taluk Kuantan, KITB/Mengkapan dan Kuala Enok)

II.1.2. Jalan Provinsi

- Penetapan Jalan Provinsi sesuai dengan SK Gubernur Riau Nomor **Kpts. 308/IV/2017** tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Riau;

- Jalan Provinsi di Provinsi Riau sepanjang **2.799,81 Km**;
- Tingkat kemantapan Jalan Provinsi tahun 2021 baru mencapai **64,94%** (berdasarkan data IRMS 2022);
- Target Kemantapan Jalan Provinsi s.d. Akhir Periode RPJMD Tahun 2024 sebesar **66,23%**, sisa **1,29%**.

II.2. Temuan dan Permasalahan

Beberapa temuan dan permasalahan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Reses dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Riau ini antara lain:

II.2.1. Peninjauan Lapangan

Beberapa hasil dari peninjauan lapangan pada Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Riau ini, antara lain adalah sebagai berikut:

II.2.1.1. Kementerian PUPR

A. PENINJAUAN JALAN LINTAS BONO DAN OBJEK STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL OMBAK BONO KABUPATEN PELALAWAN

- Ruas Jalan Lintas Bono merupakan Jalan Provinsi dengan panjang 223,5 Km dan 182 Km berada di Kabupaten Pelalawan yakni Ruas Simpang Bunut – Teluk Meranti 84,5 Km, Ruas Teuk Meranti – Sebekek 50,88 Km, Ruas Sebekek – Sokoi 46,62 Km. Sampai tahun 2023 ini sepanjang 72 Km telah kondisi aspal dan sisanya berupa *base* dan jalan tanah. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengusulkan penanganan jalan sepanjang ± 103 km, terdiri dari :
 - Rekonstruksi Jalan Ruas Simp. Bunut - Teluk Meranti – Sebekek : 63 km
 - Pembangunan Badan Jalan Sebekek – Sokoi : 40 km
- Peningkatan Ruas Jalan Lintas Bono selain untuk memperbaiki akses dan konektivitas juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan mempermudah petani dalam penjualan hasil bumi, utamanya sawit.
- Penataan kawasan di objek strategis pariwisata nasional Ombak Bono. Ombak Bono adalah fenomena alam yang diakibatkan pertemuan arus pasang air laut dengan arus sungai dari hulu menuju muara (hilir), yang berlokasi di muara sungai Kampar Kabupaten Pelalawan. Tingginya wisatawan dan seringnya dilakukan kegiatan wisata di kawasan tersebut, membutuhkan dukungan penataan kawasan demi memberikan aspek keselamatan, keamanan dan

kenyamanan bagi masyarakat, baik wisatawan domestik maupun international.

B. PENINJAUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PERPIPAAN AIR LIMBAH (IPAL) KOTA PEKANBARU

- Pembangunan IPAL Kota Pekanbaru menggunakan *Fixed-Bed Biofilm Activated Sludge* (FBAS), yaitu proses pengolahan air limbah dengan media bakteri berupa akar tanaman dan akar artifisial (biomodule). Biomodule berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya mikro organisme yang akan menguraikan air limbah sebelum dialirkan ke Sungai Siak. Teknologi ini nantinya akan menyerupai taman dan dilengkapi unit peredam bau. Sehingga masyarakat disekitar IPAL tidak akan terganggu oleh bau yang dihasilkan
- IPAL berkapasitas tampung 8.100 m³/hari tersebut direncanakan dapat melayani 11.000 sambungan rumah. Pembangunan IPAL Skala Perkotaan ini telah dimulai pada Desember 2020 dan saat ini progres fisik mencapai 94%. Pembangunan IPAL menggandeng penyedia jasa PT PP-PJL, KSO yang diharapkan ketika telah beroperasi air limbah domestik dari rumah tangga dan daerah perniagaan tidak lagi mencemari badan air atau air tanah di Kota Pekanbaru.
- Setelah IPAL ini diserahkan ke Pemko Pekanbaru melalui Badan Layanan Umum Daerah, diharapkan dapat beroperasi untuk minimal 3.000 SR. Selama satu hingga dua tahun ke depan, Kementerian PUPR diharapkan dapat melakukan pendampingan dalam rangka pemeliharaan maupun operasional kegiatan ini.

C. PENINJAUAN REVITALISASI DANAU BOKUOK KABUPATEN KAMPAR;

- Danau Bokuok terletak di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, jarak tempuh ± 40 Km dari Kota Pekanbaru. Debit air Danau Bokuok berasal dari aliran sungai mati yang berasal dari Sungai Kampar. Ketika musim hujan maka muka air akan mengalami kenaikan dan menyebabkan banjir serta meluapkannya ke Danau Bokuok. Lingkungan di sekitar danau berupa permukiman dan pada sisi selatan terdapat lahan kelapa sawit. Setiap tahunnya diselenggarakan Festival Ma'auwo, dan merupakan festival yang diinisiasi dan didukung oleh masyarakat dan Ninik Mamak setempat.

- Untuk menunjang hal tersebut Danau Bokuok perlu dilakukan revitalisasi, sehingga diharapkan akan mengembalikan dan meningkatkan fungsi danau untuk kegiatan konservasi, pariwisata dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, serta sumber air untuk pemadam kebakaran hutan (helicopter). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 Balai Wilayah Sungai Sumatera III melalui Satker NVT PJSA Sumatera III Provinsi Riau PPK Danau Situ Dan Embung telah melaksanakan Pekerjaan Revitalisasi Danau Bokuok Kabupaten Kampar.
- Pekerjaan Revitalisasi Danau Bokuok Kabupaten Kampar ini didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2022 dan APBN Tahun Anggaran 2023. Lokasi pekerjaan Desa Aursati, Kecamatan Tambang, Kabupaten, yang akan dimanfaatkan untuk kawasan wisata, UMKM maupun sarana konservasi dan pengendali banjir.
- Ke depan diusulkan agar dilakukan pembangunan sarana pendukung seperti jalan sekitar danau maupun penataan Kawasan untuk wisata bagi masyarakat sekitar.

II.2.1.2. Kementerian Perhubungan

PENINJAUAN TERMINAL TYPE A BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI

- Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) melayani trayek bus ke 48 kota/kabupaten antar kota antar provinsi (AKAP) yang tersebar di Sumatera dan Jawa serta ke 24 kota/kabupaten antar kota dalam provinsi (AKDP) Riau.
- Terminal BRPS melayani total 1.354.917 penumpang berangkat dan tiba di sepanjang tahun 2022 lalu. Jumlah ini meningkat 26,2% dari 1.073.480 penumpang di tahun 2021.

Untuk menjaga aspek keselamatan perjalanan, diminta agar diperlukan peningkatan pengawasan *rampcheck* seluruh kendaraan untuk mengantisipasi kecelakaan kendaraan. Selain itu, perlu dilakukan Langkah-langkah strategis agar kendaraan umum dapat menaik dan menurunkan penumpang di dalam terminal, bukan diluar terminal yang menimbulkan kemacetan dan kecelakaan.

II.2.2. Pertemuan Dengan Gubernur Provinsi Riau dan Kepala Daerah

II.2.2.1. Kementerian PUPR

Beberapa usulan dari pemerintah Provinsi Riau/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota terkait infrastruktur PUPR, antara lain sebagai berikut:

I. Kabupaten Pelalawan

- Peningkatan Ruas Jalan Lintas Bono yang dapat mendukung akses Kawasan Wisata Bono, Kawasan Terpadu Pelabuhan Sokoi dan Kawasan Strategis Sentra Pangan Pulau Mendol Kuala Kampar. Jalan Lintas Bono telah memenuhi *Readiness Criteria* dan berpotensi meningkatkan ekonomi di Kawasan Palalawan
- Peningkatan Struktur Jalan Ukui – Kopou (Kerumutan)
- Peningkatan Struktur Jalan Sp2 – Lubuk Kembang Bunga & Bagan Limau (Akses TNTN)
- Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Mendol dalam peningkatan produktivitas padi rawa pasang surut di kecamatan kuala Kampar.
- Penataan kawasan wisata Ombak Bono, termasuk akses jalan dan penataan kawasan disekitarnya.

II. Kabupaten Kampar:

- Usulan pembangunan rumah layak huni atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- Peningkatan Jalan Nasional yang melewati Kabupaten Kampar terutama jalur di Kecamatan Tambang dan Jalur dua Bangkinang Salo.

III. Kabupaten Kepulauan Meranti

- Peningkatan Jalan Kabupaten Bentar - Melai – Tanjung Kedabu sepanjang 35 km di Pulau Rangsang. Jalan ini adalah jalan yang menghubungkan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Perbatasan Tanjung Kedabu menuju Pelabuhan Roro Pecah Buyung. Jalan ini diusulkan menjadi Jalan Strategis Nasional.
- Peningkatan Jalan Kabupaten Meranti Bunting – Lukit (16 km), Jalan Kabupaten Meranti Bunting – Teluk Belitung (18 km), dan Jalan Kabupaten Tanjung Sari – Tanjung Gadai (11,9 km) di Pulau Padang.
- Peningkatan Jalan Provinsi Selatpanjang – Alai – Kampungbalak sepanjang 42,92 km di Pulau Tebing Tinggi. Jalan ini adalah jalan yang menghubungkan

Kota Selatpanjang menuju Pelabuhan Roro Mengkikip dan menuju Pelabuhan Roro Mengkapan, sebagai jalur angkutan barang kebutuhan pokok sehingga dapat menekan inflasi.

- Pembangunan Pengaman Pantai/ *Break Water* di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Pembangunan embung untuk kebutuhan air baku (di desa Lalang Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau).

II.2.2.2. Kementerian Perhubungan

Beberapa usulan dari pemerintah Provinsi Riau/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota terkait sektor Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Indragiri Hilir:

- Koridor Jalur Bus Trans Tembilahan
Bus yang diperlukan sebanyak 12 unit jenis Micro Bus dan naik turun penumpang melalui Halte dan Halte menjadi tempat berkumpulnya Becak dan Ojek, Bus Trans Tembilahan menempuh rute panjang sedangkan Becak dan Ojek menjadi feeder nya
- Pengembangan pelabuhan parit 21 menjadi pelabuhan penyeberangan Roro. parit 21 - sungai perak. Pelabuhan ini menghubungkan jalan Provinsi kuala Saka dengan jalan Provinsi lintas Enok dan mendukung pembangunan seberang Tembilahan sebagai Kota Tembilahan Baru (Kota Satelit)
- Bandara Tempuling saat ini sedang menunggu proses penyerahan aset hibah kepada Kementrian Perhubungan Republik Indonesia menjelang proses penyerahan Dishub mengharapkan adanya bantuan dana pengamanan aset dan kebersihan di lingkungan Bandara Tempuling.

2. Kabupaten Pelalawan

- Pembangunan Pelabuhan Sokoi yang terdiri dari:
 - Pembangunan Pelabuhan barang
 - Pembangunan Pelabuhan Roro Sokoi dan Pelabuhan Parit Bekang
- Pembangunan/ Rehabilitasi Dermaga Pulau Mendoi Kecamatan Kuala Kampar
- Pembangunan Dermaga Sungai Kerumutan.

3. Kabupaten Kepulauan Meranti

- Pengembangan Pelabuhan Roro Kampung Balak. Pelabuhan penghubung Kepulauan Meranti dengan Pulau Sumatera, mendukung distribusi bahan pokok dan komoditi pertanian.
- Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Dorak, dimana DED telah tersedia, status tanah sudah tersedia dan telah masuk ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- Pelabuhan TPI Tanjung Samak kondisinya rusak sedang dan tidak fungsional.
- Pembangunan Pelabuhan Desa Topang yang terletak di zona perbatasan 3T.
- Pembangunan Pelabuhan Sedulur dan Semulut yang terletak di Pelabuhan Sungai.
- Pembangunan Dermaga Desa Ketapang yang terletak di zona perbatasan 3T.
- Pembangunan Pelabuhan Tanjung Kedabu.

II.2.2.3. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Isu Strategis Perdesaan di Provinsi Riau:

1. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan
2. Peningkatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Riau, termasuk diantaranya:
 - a. Peningkatan tata kelola BUMDes
 - b. Penyediaan akses modal bagi BUMDes
 - c. Fasilitasi akses jejaring pasar dan kerja sama antara BUMDes
 - d. Peningkatan dukungan pendampingan pada BUMDes.

II.2.2.4. BMKG

Distribusi Peralatan Utama BMKG Provinsi Riau:

- Radar Cuaca : 1 Lokasi
- Automatic Weather Observing System (AWOS) : 4 Lokasi
- Pos Hujan Kerjasama : 152 Lokasi
- Automatic Rain Gauge (ARG) : 23 Lokasi

- Automatic Weather Stasion (AWS): 3 Lokasi Automatic
- Agroclimate Weather Station (AAWS): 3 Lokasi

Perkiraan curah hujan di Provinsi Riau dari bulan Juli s/d bulan Oktober 2023 adalah rendah sampai menengah, dan dari hasil pemantauan BMKG masih terdapat berbagai daerah yang berpotensi kebakaran hutan dan lahan.

Oleh karena itu, perlu desiminasi informasi cuaca kepada masyarakat dan seringnya dilakukan pelatihan bagi petani dan nelayan di wilayah Riau.

II.2.2.5. BNPP/ Basarnas

Beberapa permasalahan terkait Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) di Provinsi Riau antara lain adalah sebagai berikut:

- Tingginya jumlah kecelakaan kapal dan kondisi membahayakan manusia
- Terbatasnya peralatan SAR, sarana & prasarana yang tersedia
- Terbatasnya anggaran pembinaan potensi SAR
- Terbatasnya jumlah SDM untuk Pos SAR dan unit siaga SAR

Usulan solusi atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kerja sama dengan potensi SAR dalam penggunaan alat untuk operasi SAR
- Pemda dan dunia usaha diharapkan dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana SAR
- Dukungan biaya pelatihan potensi SAR melalui kerja sama dengan pemda dan dunia usaha dalam bentuk CSR
- Menempatkan personel pemda yang terlatih disetiap pos SAR dan unit siaga SAR

II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan/rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Riau pada Tanggal 14– 18 Juli 2023 ini antara lain:

II.3.1. Hasil Peninjauan Lapangan

II.3.1.1. Kementerian PUPR

A. Jalan Lintas Bono Kabupaten Pelalawan

Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk memberikan dukungan anggaran bagi Pembangunan Jalan Lintas Bono dan penataan Kawasan pariwisata Ombak Bono di Kabupaten Pelalawan dalam rangka menopang infrastruktur di kawasan pariwisata nasional Bono dan mendukung akses pertanian di Kabupaten Pelalawan.

B. IPAL Kota Pekanbaru

Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan IPAL Kota Pekanbaru agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemeliharaan sungai agar tetap bersih.

C. Revitalisasi Danau Bokuok

Komisi V DPR RI mendukung revitalisasi Danau Bokuok yang memiliki manfaat untuk konservasi, pengendali banjir dan fasilitas UMKM maupun sebagai destinasi wisata yang representatif. Selain itu, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar dalam Pembangunan tahap kedua dapat dilakukan pembangunan sarana pendukung, seperti jalan sekitar danau maupun fasilitas lainnya di Kawasan danau Bokuok.

II.3.1.2 Kementerian Perhubungan

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS)

Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk melakukan revitalisasi Terminal BRPS dan meningkatkan pengawasan terhadap kelaikoperasian kendaraan di terminal tersebut. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub untuk mempertimbangkan bantuan operasional bagi bus Trans Metro Pekanbaru dalam bentuk subsidi atau dalam bentuk lain.

II.3.2. Pertemuan Dengan Gubernur Riau Dan Kepala Daerah

II.3.2.1. Kementerian PUPR

1. Komisi V DPR RI mendukung usulan Pemerintah Provinsi Riau agar Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Pembangunan Jalan Lintas Bono untuk mendukung aktivitas wisata dan akses pertanian bagi Masyarakat.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti usulan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi Riau dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Propinsi Riau dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan kemajuan daerah.

II.3.2.2. Kementerian Perhubungan

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti usulan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung akses konektivitas masyarakat Riau.

II.3.2.3. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Komisi V DPR RI mendukung kebijakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk penguatan pemberdayaan Masyarakat desa dan peningkatan perkembangan desa di Provinsi Riau

II.3.2.4. BMKG

Komisi V DPR RI mendukung BMKG di Provinsi Riau untuk tetap melakukan pemantauan terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrem serta mengantisipasi terhadap meluasnya kebakaran hutan dan lahan

II.3.2.5 BNPP/ Basarnas

1. Komisi V DPR RI mendukung BNPP/Basarnas Provinsi Riau untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana SAR
2. Komisi V DPR RI mendukung BNPP/Basarnas Provinsi Riau untuk meningkatkan SDM untuk POS SAR dan unit siaga SAR.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI dalam rangka reses Masa Persidangan V 2022 – 2023 di Provinsi Riau pada Tanggal 14 – 18 Juli 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR-RI dan semoga dapat ditindaklanjuti Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang saat ini sangat dibutuhkan bagi rakyat Indonesia.

Ketua Tim

ttd

H. MUHAMMAD IQBAL

A – 461

LAMPIRAN:

Dokumentasi







